MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh: Siti Fatimah Kadir
Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya, sebaliknya masyarakatpun tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Karena keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi amanat untuk mendidik, melatih dan membimbing anak bangsa (masyarakat) sementara masyarakat adalah stakeholder atau pengguna jasa pendidikan.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja melainkan juga ditentukan oleh peran keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama sekolah, keluarga dan masyarakat. Maka masyarakat mempunyai peran untuk turut memikirkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat yang tinggi di sekolah menjadi indikator bahwa manajemen sekolah berjalan dengan baik. Ketika pemerintah dalam hal ini sekolah berdampingan mesra dengan masyarakat dan orang tua akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah dan akan memberi pengaruh yang besar pula bagi peningkatan prestasi belajar anak di sekolah (salah satu ukuran mutu pendidikan).

Upaya melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dapat ditempuh dengan cara (1) melakukan sosialisasi kepada para pemimpin formal. (2) Melibatkan para pemimpin formal untuk ikut memiliki sekolah/madrasah sebab maju mundurnya lembaga pendidikan akan berdampak pula pada masyarakat setempat. (3) Menunjukkan program langsung, selain mendidik anak-anak dapat pula menunjukkan prestasi yang telah dicapai baik oleh siswa, guru ataupun prestasi sekolah secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Mutu Pendidikan* dan *Pemberdayaan masyarakat.*

A. Pendahuluan

Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat, karena pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 16 dinyatakan bahwa:

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.[1] Kedudukan masyarakat dalam pendidikan selain sebagai pendukung utama, masyarakat juga sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, sarana, dan prasarana yang tersedia dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menjadi lembaga bermutu, memerlukan hubungan yang erat dengan pelanggannya. Begitupun orang tua sebagai pemasok sistem pendidikan. Mereka menyerahkan anak-anaknya kepada sekolah bermutu, oleh karena itu tanggung jawab sekolah adalah berupaya untuk bekerja sama dengan mereka. Alur hubungan antara keduanya adalah saling membutuhkan. Bila lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan yang baik maka ia akan menuai hasilnya, dalam artian akan mendapat dukungan yang positif dari masyarakat sebagai pemasok sistem pendidikan.

Sebagian besar problem lembaga pendidikan terletak pada ketidakharmonisan hubungannya dengan masyarakat, sehingga berdampak pada citra dan mutu pendidikannya. Maka tidak mengherankan, belakangan ini terdapat sekian banyak lembaga pendidikan yang tidak diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya disebabkan kurang efektifnya layanan pendidikan yang disediakan.

Dalam hal ini, pihak lembaga tidak bisa serta merta mengenyampingkan masyarakat sebagai pengguna yang memiliki harapan terhadap pendidikan yang bermutu, namun semestinya lembagalah yang harus akomodatif memenuhi harapan tersebut dengan sikap egaliter.

Salah satu strategi menjalin hubungan baik dengan masyarakat adalah lewat program pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah.[2] Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa melakukan usahanya lewat pengarahn-pengarahan,

[1] *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Hal. 2

[2] Wahibur Rokhman Jr (Dalam Usmara), *Paradigma Baru Manajemen SDM*, Yokyakarta: Amara Books, 2002, hlm: 121

pelatihan-pelatihan serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan masyarakat dalam bentuk suatu forum keorganisasian. Di samping itu, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan.

B. Konsep Dasar Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu

Ada yang menyebutkan bahwa mutu adalah suatu nilai atau keadaan, namun secara bahasa mutu memiliki kesamaan arti dengan kata kualitas, derajat dan tingkat. dalam bahasa Inggris mutu dikenal dengan *quality*, mereka mendefinisikannya dengan "*typical part of something character*". Kalau kita artikan secara bebas maknanya menjadi, "bagian yang khas dari karakter suatu barang".

Mutu merupakan topik yang hangat dibicarakan di dunia bisnis dan akademik. Faktor utama yang menentukan kinerja suatu perusahaan adalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Produk dan jasa yang bermutu adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumennya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengenal pelanggannya dan mengetahui kebutuhan dan keinginannya.

Pengertian mutu memiliki variasi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing orang atau pihak. Produsen dan konsumen akan memilki definisi berbeda mengenai mutu dari suatu barang atau jasa. Perbedaan ini mengacu pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang dan jasa yang menjadi objeknya. Namun ada satu kata yang menjadi benang merah dalam konsep mutu baik konsumen maupun produsen yaitu kepuasan. Barang atau jasa dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan dan memenuhi tuntutan pelanggan. Namun pada umumnya, mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut: *Pertama*: meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, *kedua*; mencakup produk, jasa, manusia dan lingkungan, *ketiga*: merupakan kondisi yang selalu berubah.[3] Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu didefinisikan dengan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.

2. Komponen Mutu

Komponen-komponen mutu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam upaya mewujudkan mutu. Bagian-bagian ini

[3] Azra, Azumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,* Jakarta Logos Wacana Ilmu, cet.1. 1999

merupakan pendukung dan menjadi prasyarat dimilikinya mutu, beberapa komponen mutu yang dimaksud adalah:

a. Kemanajeran yang berorientasi pada mutu. Manajer harus mengarahkan upaya pencapaian tujuan secara terpadu dengan memberikan, menggunakan alat dan bahan yang komunikatif, menggunakan data, dan mengidentifikasi orang-orang (SDM). Dalam implementasi *Total Quality Mangement* sebagai kunci proses manajemen; manajer berperan sebagai penasihat, guru dan pemimpin. Manajer suatu organisasi harus sepenuhnya menghayati implikasi manajemen dan semua perilakunya terhadap produktivitas organisasi, bahan terhadap respon pesaing. Kenyataan ini harus menyadarkan manajer untuk mengakui bahwa mereka harus mengembangkan manajemen secara partisipatif, baik visi, misi mereka maupun proses manajemen yang dapat mereka pergunakan untuk mencapai keduanya. Manajer harus mengerti bahwa TQM adalah suatu proses yang harus bersinergi dan terdiri dari prinsip-prinsip dan komponen-komponen pendukung yang harus dikelola agar mencapai perbaikan mutu secara berkesinambungan sebagia kunci keunggulan bersaing.
b. Pendidikan dan pelatihan. Perwujudan mutu dalam hal ini didasarkan pada keterampilan setiap tenaga pendidik dan kependidikan dalam merencanakan, mengorganisasikan, membuat, mengevaluasi dan mengembangkan jasa sebagai tuntutan pelanggan. Pemahaman dan keterampilan setiap tenaga pendidik dan kependidikan menjadi kunci untuk mewujudkan hal itu melalui aplikasi pemahaman dan kemampuannya. Perkembangan tuntutan pelanggan inilah yang harus terus berkembang dan harus direspon positif oleh manajer melalui penyiapan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dalam bidangnya. Dinamisasi tuntutan mengharuskan di-*upgrade*-nya kemampuan tenaga pendidikan dan kependidikan secara terus-menerus. Bahkan investasi terbesar haruslah pada SDM organisasi. Diklat terkait dengan keterampilan pokok dan keterampilan pendukung kedua-duanya menjadi utama dalam membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten. Keterbatasan implementasi diklat memungkinkan untuk memilih pada keterampilan inti, sedangkan untuk keterampilan pendukung dikembangkan melalui proses kemanajeran.
c. Struktur pendukung. Seorang manajer akan memerlukan dukungan untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu dalam melaksankan strategi pencapaian mutu. Dukungan semacam ini mungkin diperoleh dari luar melalui konsultan atau tim mutu, akan tetapi akan lebih

baik bila diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri. Tenaga kependidikan (staf) pendukung yang kecil dapat membantu manajer untuk mengartikan konsep mengenai mutu, membantu melalui network, dan membantu sebagai narasumber mengenai topik-topik yang berhubungan dengan mutu.

d. Komunikasi. Dalam suatu organisasi yang berorientasi pada mutu perlu ditempuh dengan cara yang bervariasi agar pesan yang dikomunikasikan dapat disampaikan secara efektif, manajer dapat berkomunikasi kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengenai suatu komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dalam usaha peningkatan mutu. Secara ideal manajer harus bertemu secara pribadi dengan para staf, para guru untuk meyampaikan informasi, memberikan pengarahan, dan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Namun demikian, jika tenaga pendidikan dan kependidikan jumlahnya sangat banyak, maka penyampaian mengenai komitmen organisasi terhadap mutu harus disampaikan secara-terus menerus dan konsisten.
e. Ganjaran dan pengakuan. Guru, staf yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip mutu dalam proses mutu harus diakui dan diberi ganjaran sebagaimana kemampuan organisasi, sehingga mereka sebagai anggota organisasi akan mengetahui apa yang diharapkan. Kegagalan dalam memahami seseorang yang mencapai sukses akan memberikan kesan bahwa ini bukan arah menuju pekerjaan yang sukses, dan memungkinkan promosi atau sukses individu secara menyeluruh. Jadi, pada dasarnya setiap elemen yang berhasil mencapai mutu tertentu, harus diakui dan diberi ganjaran agar dapat menjadi contoh bagi lainnya.
f. Pengukuran. Penggunaan data hasil pengukuran (evaluasi) menjadi sangat penting di dalam menetapkan proses manajemen mutu. Hasil pengukuran informasi umpan balik bagi manajer mengenai kondisi riil bagaimana gambaran proses mutu yang ada di dalam organisasi. Bahkan hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk mengambil keputusan bagi manajer. Pendapat-pendapat umum mengenai mutu organisasi harus diganti dengan fakta dan data. Setiap orang dalam organisasi dan terkait dengan organisasi harus diberitahu bahwa yang penting 'bukan' yang dipikirkan akan tetapi yang diketahuinya berdasarkan fakta dan data. Dalam menentukan dan memilih data kepuasan pelanggan eksternal harus diukur secara konsisten untuk mengetahui berapa jauh kebutuhan benar-benar dipenuhi.[4]

[4] Syafarudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Grasindo, 2002.

3. Pengertian Mutu Pendidikan

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa konsep mutu dapat diartikan secara bervariasi dalam berbagai bidang baik dalam dunia bisnis maupun bidang pendidikan. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dengan demikian, mutu merupakan ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Secara normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik mutu pendidikan merupakan prodak pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedang mutu berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrument untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih.[5] Dengan demikian, mutu ditentukan berdasarkan hasil tes atau hasil prestasi belajar.

Hubungan mutu dengan pendidikan dapat dimaknai bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah bagi komponen tersebut berdasarkan standar yang berlaku.[6] Mutu tidak lain merupakan proses. Mutu juga merupakan sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan model perbaikan sekolah dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Mutu merupakan proses struktur yang membantu orang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses pendidikan. Atau proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.[7] Berdasarkan pada beberapa definisi mutu dan mutu pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan proses yang sederhana melainkan proses yang dinamis dan penuh tantangan sehingga selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Karena itu, memerlukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan mutunya baik melalui kerjasama pengelola lembaga secara internal maupun memberdayakan potensi-potensi masyarakat.

[5] Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, tahun 1990

[6] Dzaujak Ahmad, *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di sekolah Dasar,* Jakarta, Depdikbud 1996

[7] *Of Cit,* h. 75

C. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sesuatu yang sulit untuk diucapkan namun sangat diharapkan keberadaannya dalam berbagai kegiatan, terlebih dalam dunia pendidikan. Banyak lembaga pendidikan berkompetisi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan.

Menurut Hendyat Soetopo, peningkatan mutu tidak hanya meliputi input namun juga proses dan output. Mutu input meliputi kepala sekolah, guru, konselor, staf, peserta didik (personal), gedung dan perlengkapan, dana, materi, sarana, struktur , kurikulum, peraturan, deskripsi tugas, mekanisme (operasional) dan visi, misi, sasaran dan kebijakan. Sedangkan mutu proses meliputi pembuatan keputusan, pengelolaan, program, proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi. Sedangkan mutu output meliputi hasil kerja sekolah (prestasi sekolah), ukuran yang digunakan, keefektifannya, produktifitasnya, efisiensi, inovasi dan kreatifitas, kualitas kehidupan sekolah, disiplin dan semangat dan hasil fisik atau non fisik.[8]

Dengan demikian upaya meningkatkan mutu pendidikan maka ada tiga faktor yang perlu diperhatikan yakni; (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan seperti mutu tenaga kependidikan, biaya dan sasaran belajar. (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar secara efektif, dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan di Sekolah dapat dilihat dari mutu lulusan, kualitas guru, sistem manajemen kepala sekolah, staf administrasi, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, implementasi kurikulum serta sistem penilaian dan lainnya. Karena itu keterlibatan masyarakat sebagai bagian integral dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat menjalin sinergitas, berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah seoptimal mungkin sesuai standar yang telah ditetapkan.

D. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, istilah pemberdayaan memilki kata dasar "daya" yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya kemampuan untuk melakukan usaha.[9] Atau kemampuan melakukan sesuatu, kemampuan bertindak, atau kekuatan; tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak,

[8] Hendyat Soetopo, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Malang: Pasca Sarjana UM, 2007, hlm: 127

[9] Paratanto & Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arloka, 1994, h. 94

maka selanjutnya kata pemberdayaan dapat mengandung pengertian suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan.[10]

Maka berkenaan dengan ruang lingkup pembahasan pemberdayaan dalam pendidikan, secara eksplisit definisi pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menjadikan sumber daya manusia (SDM) mampu atau kuat dalam melakukan suatu usaha pada suatu bidang tertentu dalam bidang pendidikan atau dapat juga diartikan sebagai pengguna kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam melangsungkan eksistensi satuan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan supaya bermutu.

E. Pemberdayaan Masyarakat (Hubungan Masyarakat)

Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan khususnya madrasah, diperlukan revitalisasi hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat. Hal ini penting karena sekolah/madrasah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut, di sisi lain masyarakat juga membutuhkan sekolah/madrasah untuk mendapatkan program-program yang relevan. Jalinan semacam ini dapat terjadi jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan masyarakat yang disebut humas (*public relations*) merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut serta mewujudkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang seharusnya ditingkatkan dan mendapat prioritas utama pada berbagai satuan pendidikan.

Griswold mengatakan bahwa hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan kebijakan dan prosedur instansi dan organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.[11]

Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan agar masyarakat mengerti program dan tujuan pendidikan, mengerti bagaimana melaksanakannya serta mengerti apa kebutuhan sekolah dalam memproses program pendidikan sehingga mereka terdorong untuk bekerja sama, berpartisipasi, terlibat dan berperan aktif membantu kekurangan dan kebutuhan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

[10]Depdiknas,Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) edisi III, Jakarta: PT.Persero Pnerbitan dan Percetakan Balai Pustaka BP. No.3658, 2005, h. 721

[11] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm: 124

Kegiatan-kegiatannya bisa berupa pemikiran yang konstruktif tentang pendidikan di masyarakat, membantu kepala sekolah menyusun rencana dan cara memperoleh bantuan dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah, serta mengembangkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi terutama pada lembaga pendidikan Islam (madrasah).

Dalam konteks ini, komunikasi sangat diperlukan dalam membangun kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Menempatkan semua pihak (masyarakat) sama penting akan memberikan harapan dapat menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan sekolah. Peran masyarakat melalui komite sekolah menunjukkan bahwa peran yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan bukan hanya material saja tetapi dapat menjalankan peran-peran yang lain seperti ;

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (visi lembaga).
2. Membina hubungan yang harmonis antar organisasi dengan publiknya.
3. Mengidentifikasi opini, persepsi dan respon terhadap organisasi.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran keadaan manajer manajemen (kepala sekolah) demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengtur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.[12]

Berdasarkan pada konsep pemikiran di atas maka pemberdayaan dan pelibatan masyarakat mencakup keterlibatan mental dan emosional yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan program pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Ciri keterlibatan seseorang atau kelompok dalam mengikuti suatu kegiatan adalah kemampuan untuk mengikuti suatu kegiatan dan dapat menikmati hasilnya.

Upaya melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dapat ditempuh dengan cara: (1) melakukan sosialisasi kepada para pemimpin formal. Kepala sekolah sebagai manajer puncak harus dapat meyakinkan program-program sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa; (2) Melibatkan para pemimpin formal untuk ikut memiliki sekolah/madrasah sebab maju mundurnya lembaga pendidikan akan berdampak pula pada masyarakat setempat; (3)

[12] Suharman, *Peran Masyarakat Dalam Pendidikan*, (Online), http://radarlampung.co.id, diakses 02/02/2008

Menunjukkan program langsung, selain mendidik anak-anak dapat pula menunjukkan prestasi yang telah dicapai baik oleh siswa, guru ataupun prestasi sekolah secara keseluruhan.

F. Tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Suatu organisasi perlu menyusun tahapan dalam pemberdayaan secara sistematis agar pelaksanaan kegiatan terarah. Menurut Khan (1995) secara umum tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat adalah[13]:

1. Mengembangkan pemahaman secara menyeluruh tehadap program pemberdayaan yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau para ahli dalam bidang *empowerment*. Guna mendukung efektivitas pemberdayaan maka perlu mengetahui instrument pendukung pemberdayaan lain seperti penentuan jangka panjang, penggunaan perangkat lunak, dan penentuan anggaran.
2. Membuat daftar kegiatan atau kesempatan yang dapat mendukung pemberdayaan.
3. Menyeleksi berbagai kegiatan yang mempunyai kesempatan yang lebih signifikan untuk sukses dan memiliki resiko yang minimal.
4. Memberikan pengertian kepada setiap personel agar memahami *job expectation* dan *metric*.
5. Menetapkan prosedur *follow-up* untuk *sharing* kamajuan kapada semua pihak secara individual maupun kelompok.
6. Menciptakan, menjaga dan meningkatkan kepercayaan sebagai unsur terpenting dalam pemberdayaan antar berbagi pihak.
7. Menilai kamajuan yang diperoleh dari program pemberdayaan.

Tahapan tersebut sangat penting direncanakan dalam program pemberdayaan sebagai acuan pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan organisasi sekolah terhadap objek yang diberdayakan. Masyarakat sebagai alat kontrol terhadap pendidikan dapat memberi masukan bagi penyelenggaraan pendidikan. Opini positif masyarakat akan sangat membantu sekolah dalam mewujudkan segala program dan rencana pengembangan sekolah secara optimal sebab opini yang baik merupakan modal utama bagi sekolah untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

G. Kesimpulan

Mutu adalah suatu nilai atau keadaan, namun secara bahasa mutu memiliki kesamaan arti dengan kata kualitas, derajat dan tingkat. Dalam

[13] Wahibur Rochman, Jr (dalam Usmara), 2002, hlm: 131-132

bahasa Inggris mutu dikenal dengan *quality*. Berarti mutu dapat dikatan ukuran baik buruk suatu benda, keadaan taraf atau derajat.

Dalam konsep pendidikan "mutu pendidikan" diartikan kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional terhadap komponen-komponen pendidikan sehingga memberi nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut standar yang berlaku. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu berdasarkan karakteristiknya, diperlukan partisipasi masyarakat dan keterbukaan pengelola pendidikan di sekolah untuk bersama-sama merespon program pendidikan yang akan dilakukan oleh sekolah.

Bentuk partisipasi masyarakat adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan, memberikan support baik finansial, pemikiran atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menjadi kontrol penyelenggaraan pendidikan secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Dzaujak. 1996. *Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di sekolah Dasar,* Jakarta, Depdikbud

Arcaro,Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip –Prinsip Perumusan dan Data Langkah Penerapannya)*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar

Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi III*. Jakarta: PT. Persero Penerbitan dan percetakan Balai Pustaka BP.No.3658

Gorton, Richard A. 1997. *School Administration*. Dubuqe Lowa; Wm c.Brown Company

Hamalik, Oemar. 1990. *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan,Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Al-Husna

Imron, Ali dkk. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Malang : Universitas Malang

Indra Fachrudi, Soekarto. 1994. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah Dengan Orang Tua dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang

Partanto & Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka

Rochman, Wahibur Jr. 2002. *Paradigma Baru Manajemen SDM*. Yogyakarta: Amora Book

Soetopo, Hendyat. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Malang. Pasca Sarjana UM

Syafarudin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Grasindo